

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Kejati Terus Usut Kasus Pengadaan Buku Sejarah
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat Hal.2
Edisi	: Selasa, 20 Maret 2018

## Kejati Terus Usut Kasus Pengadaan Buku Sejarah

**BANDUNG, (PR).-**

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan terus mengusut dan menuntaskan kasus korupsi pengadaan buku cetak bidang sejarah purbakala tahun anggaran 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Hal itu sekaligus menepis adanya anggapan penghentian kasus yang menyeret Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, DS sebagai tersangka.

"Tidak ada penghentian kasus, kata siapa?. Kami terus lanjut dan sekarang sedang ditangani pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymond Ali, di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (19/3/2018).

Ia menegaskan, kasus-kasus yang ditangani Kejati Jabar dipastikan terus bergulir termasuk kasus pengadaan buku tersebut. Hanya dalam penanganannya butuh proses untuk pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti-bukti yang nantinya akan dihadapkan ke persidangan.

Mengenai tersangka yang hingga saat ini belum ditahan, Raymond menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. "Soal penahanan, itu kewenangan penyidik, kita tidak bisa ikut campur atau mendorong-dorong karena itu kewenangan penuh di penyidik," ujarnya.

Raymond mengungkapkan, selama proses penyidikan kasus tersebut, Kejati Jawa Barat telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp 1,35 miliar yang telah disita dari beberapa pihak yang terkait kasus tersebut. "Kami sudah sita dan dijadikan pengembalian uang kerugian negara. Meski begitu, proses penyidikan berlanjut. Jadi tidak ada penghentian kasus," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya penyidik Kejati Jabar menetapkan DS, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku cetak bidang sejarah purbakala tahun anggaran 2015. Pada kasus tersebut, kejaksaan berhasil mengamankan kerugian negara hingga Rp 1,35 miliar.

DS diduga telah melakukan penggelembungan atau *mark up* dana dalam pengadaan buku sejarah purbakala. DS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-60/O.2.1/Fd.1/01/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Dalam pengadaan buku tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp 978.850.000. Namun, selaku Kabid Sejarah dan Purbakala, DS mengajukan perubahan anggaran dengan realisasi sebesar Rp 10,34 miliar yang akan dialokasikan untuk sembilan kegiatan bidang sejarah dan kepurbakalaan.

Raymond melanjutkan, dari total anggaran Rp 10,34 miliar tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,56 miliar untuk belanja cetak dan pengadaan buku sebanyak 61.716 buku dengan 18 judul buku. Dalam pelaksanaannya, belanja cetak dan pengadaan buku tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan pada proses penetapan harga perkiraan sendiri tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga terjadi kemahalan harga.

"Atas hal tersebut berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, jumlah kerugian negara yakni sebesar Rp 2,95 miliar," ucapnya. **(Yedi Supriadi)\*\*\***